

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWALAN LALU LINTAS DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024

Berlinnanda¹, Ainun Jariah²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

*email: berlinnandabebey@gmail.com

Abstrak

Pengawasan lalu lintas menjadi salah satu kewajiban yang dijalankan oleh pihak kepolisian lalu lintas dalam mengawal jalannya pesta demokrasi agar berjalan aman, tertib dan lancar. Metode penelitian deskriptif kualitatif menjadi pilihan untuk menjabarkan Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu Lintas dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024. Hasil Peneliti menunjukkan bahwa dalam implementasi yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku misalnya !0 pelaksanaan telah bersandar pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku; 2) Sumber Daya yang dimiliki telah berdasarkan pada peraturan yang menaunginya, akan tetapi sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana harus dimaksimalkan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengawasan Lalu Lintas

Abstract

Traffic escort is one of the obligations carried out by the traffic police in guarding the course of the democracy party so that it runs safely, orderly and smoothly. The qualitative descriptive research method is an option to describe the Implementation of Traffic Escort Policy in the Implementation of Regional Elections in Gunung Mas Regency in 2024. The results of the researcher show that the implementation has been carried out in accordance with the applicable policies, for example, !0 the implementation has relied on the applicable Standard Operating Procedures; 2) The resources owned have been based on the regulations that govern them, but human resources and infrastructure resources must be maximized.

Keywords: Implementation, Policy, Traffic Control

PENDAHULUAN

Indonesia yang dengan telah menyatakan sebagai negara yang merdeka, tentu memberikan kesempatan untuk mencapai tujuan dari berdirinya negara tersebut. Seperti yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 dalam pembukaannya yakni mengamatkan agar masyarakatnya dapat hidup sejahtera. Untuk menjaga keseimbangan, Indonesia menggunakan sistem presidensial, yang membagi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA | Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, n.d.)

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dalam penyelenggaraannya Indonesia menitik beratkan pada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, maka penlaksanaan pemerintahan kini bersandar pada system demokrasi. Demokrasi ini

kemudian berkaca dari pendapatnya Dahl, seorang ilmuwan politik Amerika Serikat, menggambarkan demokrasi sebagai sistem politik di mana persaingan terbuka dan inklusif dilakukan untuk membuat keputusan politik. Dia percaya bahwa demokrasi yang efektif harus mencakup perlindungan hak minoritas, partisipasi politik yang luas, dan kebebasan berbicara dan berserikat. ("Demokrasi," 2023)

Dalam ajang demokrasi yang dilakukan salah satunya ditandai dengan adanya pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 tahun sekali, memilih para pemimpin baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Salah satu tugas kepolisian dalam penyelenggaraan demokrasi tersebut yaitu memberikan pengamanan kepada para calon kontestan yang mengikuti. Begitu pun pada Kabupaten Gunung Mas yang telah diberikan kewenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga didampingi

berbagai pengamanan salah satunya yaitu tugas kepolisian untuk memberikan pengamanan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawalan ini didasari dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakilpresiden dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (*Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Jawa Barat*, n.d.)

Selain itu sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2002 (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA*, n.d.-a) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang salah satunya menyampaikan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pengawalan lalu lintas pada seluruh calon yang berkontestasi dalam Pilkada Tahun 2024 sebagai calon pemimpin daerah di Kabupaten Gunung mas juga dalam hal ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Kabupaten Gunung Mas.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan seperti kurang tersedianya fasilitas pendukung yang memadai.

Pada sisi lainnya juga masih didapati kendala berupa sumber daya manusia yang masih minim, sehingga dalam pengawalan yang dilakukan masih belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan maksimal. Mengingat agenda para calon pemimpin daerah tersebut beragam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam mengenai Implementasi Kebijakan Pengawalan Lalu

Lintas dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara keseluruhan dan secara deskriptif dengan menggunakan berbagai metode alamiah dan konteks alami. (Jarrah et al., 2024)

Menurut Bogdan dan Taylor—seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong—penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Jarrah et al., 2023)

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data agar lebih dapat leluasa dalam melakukan analisa terkait Implementasi Kebijakan Pengawalan Lalu Lintas dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

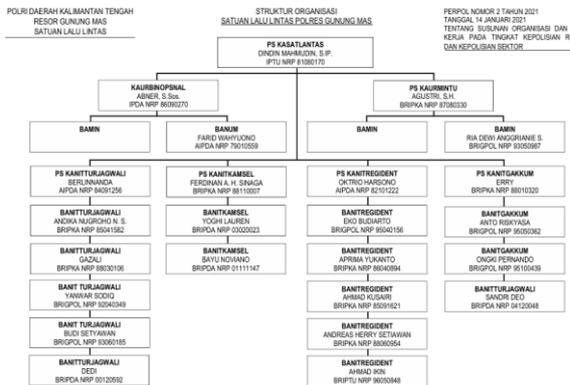
Adapun hasil penelitian yang dilakukan dalam menganalisa mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Pengawalan Lalu Lintas dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dapat dilihat pada uraian berikut.

Implementasi Kebijakan sebagaimana dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik oleh Subarsono (2005) yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn meliputi. (*BAB II.Pdf*, n.d.)

I. Standar dan sasaran kebijakan

Sebuah kebijakan harus memiliki standar dan sasaran yang jelas dan dapat diukur sehingga dapat

dengan PERPOL Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 14 Januari 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor yang dapat dilihat pada struktur organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Gunung Mas.



Gambar 2. Struktur organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Gunung Mas

Selain sumber daya manusia, hal yang mendukung jalannya sebuah implementasi kebijakan yaitu tersedianya sumber daya berupa sarana dan prasarana. Dimana dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dalam pengawasan Lalu Lintas bagi calon kepala daerah dapat dilihat pada table berikut.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
RESOR GUNUNG MAS

DATA SARPRAS POLRES GUNUNG MAS

NO	NAMA BARANG	SATUAN	BAIK	KONDISI RUSAK RINGAN	RUSAK BESAT	KET
1	Jalan	M2	800			
2	Jalan	M2	214.190			
3	SPB	Unit	3	3	2	
4	Kantain Waqaf	Unit	1			
5	Meca Box	Unit	1			
6	Meca Bks	Unit	3	1		
7	Truck	Unit	1			
8	Trak	Unit	2			
9	R2 umum	Unit	28	24	13	
10	R2 Patrol	Unit	7			
11	R2 Linak	Unit	1			
12	R2 Lintak	Unit	2			
13	R4 Ambulance	Unit	1	1		
14	R4 Yulham	Unit	1	1		
15	R4 Yulham	Unit	1			
16	R4 Water Cannon	Unit	2			
17	R4 Jarak	Unit	1			
18	R4 Patrol	Unit	1			
19	R4 Penerimaan	Unit	1			
20	Rampung Infotam	Unit	2			
21	R4 Saperata	Unit	2			
22	Sepeda	Unit	3			
23	Sopet Bks	Unit	1			
24	Kapal Ulat penerangan air	Unit	1		3	
25	Korban Karet	Unit	1			
26	Alat Akrobat	Unit	1			
27	HT	Unit	245			
28	Bangunan Gedung Kantor Perumahan	Unit	6			
29	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	4	1	1	
30	Bangunan Gedung Tempat Badan Perumahan	Unit	1			
31	Bangunan Gedung Pertemuan Perumahan	Unit	1			
32	Bangunan Pengujian Kelelahan Perumahan	Unit				
33	Rumah Negara Gokongan II Tipe A Perumahan	Unit	11			
34	Rumah Negara Gokongan II Tipe C Perumahan	Unit	1			
35	Rumah Negara Gokongan II Tipe D Perumahan	Unit	6			
36	Rumah Negara Gokongan II Tipe D Semi Perumahan	Unit	1	7	1	
37	Rumah Negara Gokongan II Tipe E Perumahan	Unit	9			
38	Rumah Negara Gokongan II Tipe E Perumahan	Unit	2			
39	Rumah Khusus	Unit	4			
40	Helipad	M2	36			

Tabel 1. Data Sarpras Polres Gunung Mas

3. Hubungan antar organisasi

Pusat perhatian pada agen pelaksana

meliputi organisasi formal dan anisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kineja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh corak para agen pelaksana.(Riyanti et al., 2024)

Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Mengingat pentingnya hubungan antar Lembaga yang dibangun untuk kesuksesan setiap program atau tanggungjawab yang dijalankan, maka sesuai dengan amanat yang tertuang pada peraturan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam pelaksanaan pilka maka pihak kepolisian bersinergi dengan Bawaslu dan Kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum terpadu yang biasa dikenal dengan GAKKUMDU.



Gambar 3. Pengawasan calon kepala daerah Kabupaten Gunung Mas saat Pelaksanaan Pilkada

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mengacu pada birokrasi, norma, dan hubungan dalam birokrasi, yang semuanya mempengaruhi implementasi program.

Koordinasi merupakan mekanisme yang Tangguh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dalam arus komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses

implementasi, maka semakin kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan konflik begitupun sebaliknya.



Gambar 4. Persiapan pengawalan calon kepala daerah Kabupaten Gunung Mas

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, saat akan melaksanakan pengawalan terhadap calon kepala daerah dilakukan arahan dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Sehingga pada capaian ini tentu dalam implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu Lintas dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

5. Kecenderungan / disposisi pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan agen pelaksana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sukses tidaknya implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat di Indonesia, proses kebijakan publik belum dimulai dan merupakan hasil perumusan masyarakat lokal yang sadar akan permasalahan dan tantangan yang mereka hadapi.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni: a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan c) intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dari tiga aspek yang mempengaruhi implementor pada Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu Lintas dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dilihat dari

penanganan masalah di lapangan yang terjadi, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, pemahaman setiap personal dalam mengatasi setiap kendala juga menjadi tolak ukur keberhasilan setiap pelaksanaan yang terjadi.

6. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.



Gambar 5. Pengawalan Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Salah satu bentuk keberhasilan sebuah implementasi kebijakan yaitu adanya sinergitas antar seluruh unsur yang terlibat.

Dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu Lintas dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 pihak Kepolisian terutama Satlantas Polres Gunung Mas melakukan berbagai pendekatan dengan seluruh unsur pemuda, tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dan lainnya untuk dapat menjalankan secara maksimal apa yang telah menjadi tanggungjawab sesuai dengan kebijakan peraturan perundangan yang dijalankan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu Lintas dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, telah berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku yakni sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta peraturan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain itu ketersediaan sumber daya terutama sumber daya manusia dalam implementasi ini sudah bersandar pada PERPOL Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 14 Januari 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor dan pada petugas pengawasan berdasarkan pada PERPOL Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 14 Januari 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor Kabupaten Gunung Mas.

Namun dalam menjalankan hal tersebut, tentu sumber daya baik pada sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana harus ditingkatkan, mengingat berbagai agenda yang dijalankan dapat bersamaan.

REFERENSI

10. Bab 2.pdf. (n.d.). Retrieved January 1, 2025, from <https://repository.umj.ac.id/17148/10/10.%20bab%202.pdf>
- BAB 11.pdf. (n.d.). Retrieved January 1, 2025, from <https://repository.uin-suska.ac.id/2790/3/BAB%2011.pdf>
- Bd, W. C. (n.d.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*.
Demokrasi: Pengertian dan Sejarahnya di Indonesia. (2023, July 26). *FISIP UMSU Terbaik di Medan*. <https://fisip.umsu.ac.id/demokrasi-di-indonesia-pengertian-dan-sejarahnya/>
- Jariah, A., Ariyadi, A., & Riyanti, N. (2023). Pengelolaan Hutan Adat pada Perspektif Ekologi Politik dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat Menengah ke Bawah di Kabupaten Katingan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4475. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2867>
- Jariah, A., Laksminarti, L., & Yusuf, M. (2024). PENGELOLAAN DUKUH BETUNG SEBAGAI WISATA LOCAL CULTURE MASYARAKAT DAYAK KABUPATEN KATINGAN. *Jurnal Darma Agung*, 30(1), Article 1. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.2977>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Barat. (n.d.). Jdihjabar. Retrieved January 1, 2025, from <https://jdih.jabaprov.go.id/>
- Peraturan POLRI No. 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor. (n.d.). Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. Retrieved January 1, 2025, from <https://peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-2-tahun-2021>
- Noor, R. Z., Norcahyono, N., & Ariyadi, A. (2024). BIMBINGAN AGAMA TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MENGAJUKAN PERCERAIAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BARITO UTARA. *TEACHING AND LEARNING JOURNAL OF MANDALIKA (TEACHER)* e-ISSN 2721-9666, 4(2), 219-238.
- Ramdhani, M. Tri, et al. "Law Politics Of People's Mining Based On Maqashid Syariah's Welfare And Social Justice Viewpoint." *Russian Law Journal* 11.35 (2023): 269-279.
- Riyanti, N., Jariah, A., Ariyadi, & Selawaty, D. (2024). The Urgency of Implementing Collaborative Governance in New Housing in Palangkaraya City. *KnE Social Sciences*, 9(7), 227-235. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i7.15483>
- SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA | Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. (n.d.). Retrieved January 1, 2025, from <https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sistem-pemerintahan-indonesia-20>
- Saputra, D. R., Achmadi, A., & Ariyadi, A. (2024). PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI POLRES BARITO UTARA. *TEACHING AND LEARNING JOURNAL OF MANDALIKA (TEACHER)* e-ISSN 2721-9666, 4(2), 279-293.
- Rianto, R. J. A., Achmadi, A., & Ariyadi, A. (2024). KONSEP SIDANG PRA NIKAH ANGGOTA KEPOLISIAN (STUDI KEPOLISIAN RESOR BARITO UTARA). *TEACHING AND LEARNING JOURNAL OF MANDALIKA (TEACHER)* e-ISSN 2721-9666, 4(2), 239-258.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. (n.d.-a). Retrieved December 31, 2024, from <https://www.regulasip.id/book/1397/read>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR

2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA. (n.d.-b). Retrieved January 1,
2025, from

<https://www.regulasip.id/book/1397/read>

Wijaya, R., Sanawiah, S., & Ariyadi, A. (2024).
PENERAPAN MEDIASI PENAL DI POLRES
BARITO UTARA DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA. *TEACHING AND LEARNING JOURNAL
OF MANDALIKA (TEACHER)* e-ISSN 2721-
9666, 4(2), 259-278.